LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mendorong Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaannya.

Terbitnya kebijakan di bidang pemerintahan di atas melahirkan konsekuensi timbulnya perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan karakteristik tugas.

Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, perlu menyesuaikan kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penataan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, sarana dan prasarana serta perangkat pelayanan umum secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

Selaras dengan otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan (*services provider*) kepada masyarakat sebagai penerima layanan (*services recipient*), sudah selayaknya diambil langkah-langkah perbaikan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah secara profesional dan deregulasi kebijakan di bidang pelayanan umum. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan umum di Daerah, maka citra dan wibawa aparatur pemerintah daerah di masyarakat akan meningkat. Di samping aspek tersebut, tingkat persaingan di era globalisasi ini semakin tajam di berbagai sektor. Kondisi demikian menuntut ditingkatkannya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi, salah satu komponen Pemerintah Daerah yang perlu segera dibenahi adalah karakter, budaya dan kondisi disiplin aparatur pemerintah. Artinya, semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka semakin baik citra aparatur pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, berperan memberikan dukungan melalui perumusan kebijakan dan mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2019 berisi rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2019. Rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan, program, dan sasaran tahunan Sekretariat Daerah Kota Malang.

2. Landasan Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
   c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
   d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
   h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
   j. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
o. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
q. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
r. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
s. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 188.451/100/35.73.112/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi sarana akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Malang selama Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
   Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan capaian Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Daerah pada tahun 2017, sebagaimana dapat dilihat dalam capaian Sasaran Sekretariat Daerah berikut ini:

a. Sasaran Kesatu

Sasaran Kesatu adalah Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah. Sasaran tersebut diwujudkan dalam 12 (dua belas) program dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei kepuasan masyarakat pada Sekretariat Daerah	78,5%	79,71%	100,54%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Kesatu telah tercapai dengan capaian 100,54%, dengan kategori Sangat Berhasil.

b. Sasaran Kedua

Sasaran Kedua adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat daerah. Sasaran tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	62%	67,71%	109,21%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Kedua telah tercapai dengan capaian 109,21%, dengan kategori Sangat Berhasil.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018

Kota Malang

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Relalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya									
4	1			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi									
4	1	15		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,131		3,131	3,194	102,01%	3,131	3,131	100%
4	1	15	01	Penilaian sinergitas dan kinerja kecamatan	Keterwakilan Kota Malang dalam penilaian pada tingkat provinsi			5 Kecamatan, 5 besar tingkat Provinsi	5 Kecamatan, 5 besar tingkat Provinsi	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	15	02	Penyusunan Toponimi Unsur Daya Buatan Kota Malang	Jumlah dokumen toponimi unsur daya buatan			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	15	03	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah dokumen hasil monev penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	1	15	04	Penyusunan Monografi Kota Malang	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4	1	15	05	Fasilitasi partisipasi dalam Forum Sekretaris Daerah	Jumlah kegiatan forum Sekretariat Daerah yang difasilitasi			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
4	1	15	06	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	1	15	07	Penyampaian ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Jumlah media			2 media	2 media	100,00%			
4	1	15	08	Koordinasi Penyusunan LKPJ Kota Malang	Jumlah dokumen LKPJ	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4	1	15	09	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Daerah	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan			2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%			
4	1	15	10	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan, 57 kelurahan		5 kecamatan, 57 kelurahan	5 kecamatan, 57 kelurahan	100,00%	5 kecamatan, 57 kelurahan	5 kecamatan, 57 kelurahan	100%
4	1	15	11	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Jumlah ASN yang mengikuti paningkatan kapasitas			62 orang	62 orang	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	15	12	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengikuti peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan			5 kecamatan	5 kecamatan	100,00%			
4	1	15	13	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah penyelenggaraan kerjasama yang difasilitasi	7 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100,00%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4	1	15	14	Fasilitasi penanganan masalah kemasyarakatan	Jumlah dokumen masalah kemasyarakatan			12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
4	1	15	15	Fasilitasi penyelenggaran pemerintahan umum	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	15	16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	15	17	Monitoring, Evaluasi dan Laporan penerapan SPM	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4	1	15	18	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil SKM	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	1	15	19	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
4	1	15	20	Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Walikota/Wakil Walikota dan Anggota Legislatif	Jumlah Administrasi Walikota/ Wakil Walikota dan anggota legislatif			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	16		Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%		100%	97,45%	97,45%	100%	100%	100%
4	1	16	01	Penyediaan layanan keprotokoleran	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan		24 kali	24 kali	100,00%	900 layanan	900 layanan	100%
4	1	16	02	Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Jumlah layanan kehumasan	1.112 kali layanan		20 kali	34 kali	170,00%	1.112 kali layanan	1.112 kali layanan	100%
4	1	16	03	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang		550 kali tayang	536 kali tayang	97,45%	550 kali tayang	550 kali tayang	100%
4	1	16	04	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis	100%
4	1	16	05	Pembuatan majalah pemerintah kota	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar		12 edisi/ 18.000 eks	12 edisi/ 18.000 eks	100,00%	18.000 eksemplar	18.000 eksemplar	100%
4	1	16	06	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang		36 media	36 media	100,00%	694 kali tayang	694 kali tayang	100%
4	1	17		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	13	51	17	16	94,12%	13	13	100,00%
4	1	17	01	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberian Insentif Modin	Jumlah modin perawat jenazah memperoleh pembinaan	100 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100,00%	100 orang	100 orang	100,00%
4	1	17	02	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan HUT Kota Malang	Jumlah peserta tokoh lintas agama yang mengikuti panjatan doa		300 orang	100 orang	100 orang	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	17	03	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan HUT RI	Jumlah peserta tokoh lintas agama yang mengikuti panjatan doa		300 orang	100 orang	100 orang	100,00%			
4	1	17	04	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tahun Baru	Jumlah peserta tokoh lintas agama yang mengikuti panjatan doa		300 orang	100 orang	100 orang	100,00%			
4	1	17	05	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial keagamaan	100 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100,00%	100 orang	100 orang	100,00%
4	1	17	06	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	2.000 orang	6.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	100,00%	2.000 orang	2.000 orang	100,00%
4	1	17	07	Fasilitasi Parade Muharam dan Hari Santri	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam dan hari santri	400 orang	1.200 orang	400 orang	400 orang	100,00%	400 orang	400 orang	100,00%
4	1	17	08	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberian Insentif Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah peserta penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	224 orang	300 orang	100 org	100 org	100,00%	224 orang	224 orang	100,00%
4	1	17	09	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian tempat Ibadah	Jumlah draft rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	3 draft	6 draft	2 draft	2 draft	100,00%	3 draft	3 draft	100,00%
4	1	17	10	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	100 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100,00%	100 orang	100 orang	100,00%
4	1	17	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah peserta yang mendapatkan bantuan transportasi	1.200 orang	3.900 orang	1.300 orang	1.315 orang	101,15%	1.200 orang	1.200 orang	100,00%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	17	12	Sosialisasi Keluarga Sakinah	Jumlah peserta pembinaan kadarkum		300 orang	100 orang	100 orang	100,00%			
4	1	17	13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah peserta guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	400 orang	1.368 orang	456 orang	456 orang	100,00%	400 orang	400 orang	100,00%
4	1	17	14	Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta fasilitasi pengembangan tilawatil quran	45 orang	120 orang	40 orang	40 orang	100,00%	45 orang	45 orang	100,00%
4	1	17	15	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	200 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100,00%	200 orang	200 orang	100,00%
4	1	17	16	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah peringatan hari besar keagamaan	4 kegiatan	12 kegiatan	4 kegiatan	0	0,00%	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%
4	1	17	17	Fasilitasi Pedoman Wakaf	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100,00%	100 orang	100 orang	100,00%
4	1	18		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen analisa pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang disusun	8 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100,00%	8 dokumen	8 dokumen	100,00%
4	1	18	01	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	Jumlah fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	1	18	02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah	Jumlah bahan perumusan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	18	03	Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pertemuan tim pengendali inflasi daerah	10 kali pertemuan		10 kali pertemuan	10 kali pertemuan	100,00%	10 kali pertemuan	10 kali pertemuan	100,00%
4	1	18	04	Fasilitasi dan koordinasi perekonomian daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perekonomian daerah			4 kali koordinasi, 4 kali konsultasi	4 kali koordinasi, 14 kali konsultasi	225,00%			
4	1	18	05	Penyusunan bahan analisa perekonomian daerah	Jumlah dokumen analisa perekonomian daerah			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	18	06	Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik daerah	Jumlah badan usaha milik daerah yang menerima pembinaan dan pemberdayaan			3 BUMD, 1 kali rapat koordinasi	3 BUMD, 2 kali rapat koordinasi	150,00%			
4	1	18	07	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 dokumen		2 jenis	2 jenis	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	1	19		Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan infrasturktur yang difasilitasi	100%		100% (8 dokumen/8 dokumen)	75% (6 dokumen/8 dokumen)	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	1	19	01	Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	Tersedianya bahan analisis kebijakan sumber daya alam			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	19	02	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan di bidang Sumber Daya Alam	Terpenuhinya kajian kebijakan urusan ketahanan pangan			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	19	03	Pelaksanaan Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Insfrastruktur	Tersusunnya layanan administrasi bidang pengembangan infrastruktur			1 dokumen	0 dokumen	0,00%			
4	1	19	04	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sumber Daya Alam	Terpenuhinya kajian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang sumber daya alam			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	19	05	Pelaksanaan Layanan Administrasi Bidang Sumber Daya Alam	Tersusunnya layanan administrasi bidang sumber daya alam			1 dokumen	0 dokumen	0,00%			
4	1	19	06	Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya bahan analisis kebijakan pengembangan infrastruktur			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	19	07	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan di bidang Pengembangan Insfrastruktur	Terpenuhinya kajian kebijakan urusan perikanan			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	19	08	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur	terpenuhinya kajian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang infrastruktur			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	20		Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100,00%		100,00%	87,43%	87,43%	100,00%	100,,%	100,,%
4	1	20	01	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	350 paket		350 paket	306 paket	87,43%	350 paket	350 paket	100,00%
4	1	20	02	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah aplikasi pengadaan barang jasa			1 aplikasi	1 aplikasi	100,00%			
4	1	21		Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	1	21	01	Bimbingan Teknis *Legal Drafting*	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis *Legal Drafting*	70 orang		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	70 orang	70 orang	100,00%
4	1	21	02	Kajian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	5 Perda, 10 Perwal		10 perda, 10 perwal	10 perda, 10 perwal	100,00%	5 Perda, 10 Perwal	5 Perda, 10 Perwal	100,00%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	21	03	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda yang diharmonisasi	20 Ranperda		17 ranperda	17 ranperda	17,00%	20 Ranperda	20 Ranperda	100,00%
4	1	21	04	Fasilitasi/Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal dan Rankepwal	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepsekda		100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepsekda	38 ranperwal, 425 rankepwal, 173 rankepsekda	106,00%	100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepsekda	100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepsekda	100,00%
4	1	21	05	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	1	21	06	Penyusunan Keterangan dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda perubahan yang telah disusun	0		1 ranperda	1 ranperda	100,00%	0	0	
4	1	21	07	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Rankepwal dan Rankepsekda	Jumlah ranperwal tentang tata cara penyusunan rankepwal dan rankepsekda yang telah disusun	0		1 ranperwal	0	0,00%	0	0	
4	1	21	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Ranperwal	Jumlah ranperwal tentang tata cara penyusunan ranperwal yang telah disusun	0		1 ranperwal	0	0,00%	0	0	
4	1	21	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Ranperda	Jumlah ranperwal tentang tata cara penyusunan ranperda yang telah disusun	0		1 ranperwal	0	0,00%	0	0	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	22		Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100,00%		100,00%	72,73%	72,73%	100,00%	100,00%	100,00%
4	1	22	01	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan yang dipublikasi			1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4	1	22	02	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	310 orang	803 orang	300 orang	237 orang	79,00%	310 orang	310 orang	100,00%
4	1	22	03	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	600 orang	1378 orang	300 orang	294 orang	98,00%	600 orang	600 orang	100,00%
4	1	22	04	Penyampaian Informasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	700 orang		700 orang	660 orang	94,29%	700 orang	700 orang	100,00%
4	1	22	05	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 sidang	154 sidang	90 sidang	69 sidang	76,67%	140 sidang	140 sidang	100,00%
4	1	22	06	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	22 sidang	24 sidang	11 sidang	8 sidang	72,73%	22 sidang	22 sidang	100,00%
4	1	22	07	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Jumlah peserta bimbingan Teknis	110 orang		55 orang	55 orang	100,00%	110 orang	110 orang	100,00%
4	1	22	08	Redokumentasi dan Penataan Produk Hukum	Jumlah dokumen yang diredokumentasi	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
4	1	23		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi	100,00%		100,00% (16 Ranperwal/16 Ranperwal)	106,25% (17 Ranperwal/16 Ranperwal)	106,25%	100,00%	100,,%	100,00%
4	1	23	01	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100,00%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	23	02	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	1	23	03	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	15 Ranperwal	14 ranperwal	16 Ranperwal	17 Ranperwal	106,25%	15 Ranperwal	15 Ranperwal	100,00%
4	1	23	04	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dasar	Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
4	1	23	05	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev yanblik	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	1	23	06	Penguatan Kelembagaan	Jumlah perangkat daerah Kota Malang yang telah mendapat penguatan kelembagaan			43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100,00%			
4	1	24		Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%		100% (2 Rencana Aksi/2 Rencana Aksi)	100% (2 Rencana Aksi/2 Rencana Aksi)	100,00%	100%	100%	100%
4	1	24	01	Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Ranperwal tentang perubahan rencana aksi			1 Ranperwal	1 Ranperwal	100,00%			
4	1	24	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	1	24	03	Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah dan dokumen perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	24	04	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Jumlah rankepsekda tentang Renstra Sekretariat Daerah			1 Rankepsekda	1 Rankepsekda	100,00%			
4	1	24	05	Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Jumlah rankepsekda tentang Renja Sekretariat Daerah			1 Rankepsekda	1 Rankepsekda	100,00%			
4	1	24	06	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	1	24	07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran			2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
4	1	24	08	Penyusunan dan Sosialisasi Mekanisme Tahunan	Jumlah ranperwal tentang mekanisme tahunan			1 Ranperwal	1 Ranperwal	100,00%			
4	1	24	09	Resertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Sekretariat Daerah	Jumlah sertifikat ISO Sekretariat Daerah			1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00%			
4	1	25		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%		100%	100%	100,00%			100%
4	1	25	01	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4	1	25	02	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat menyurat yang terdistribusi tepat waktu	100%		100%	86,16%	86,16%	100%	100%	100%
					Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
					Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%		100%	79,59%	79,59%	100%	100%	100%
5	1	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat kedinasan yang dilayani	14.500 surat		14.400 surat	12.407 surat	86,16%	14.500 surat	14.500 surat	100%
5	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening air, telepon, listrik di lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
5	1	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan laik jalan dari segi administrasi dan fisik	192 STNK		196 STNK	156 STNK	79,59%	192 STNK	192 STNK	100%
5	1	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	32 ruangan		32 ruangan	32 ruangan	100,00%	32 ruangan	32 ruangan	100%
5	1	01	05	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			16 jenis	9 jenis	56,25%			
5	1	01	06	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor			90 jenis	90 jenis	100,00%			
5	1	01	07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket/152.600 lembar/250 buku		29 jenis	29 jenis	100,00%	1 paket/152.600 lembar/250 buku	1 paket/152.600 lembar/250 buku	100%
5	1	01	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 paket		4 jenis	3 paket	75,00%	2 paket	2 paket	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	01	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaaan dan referensi	50.400 eksemplar		50.400 eksemplar	50.400 eksemplar	100,00%	50.400 eksemplar	50.400 eksemplar	100%
5	1	01	10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	14 jenis		8 jenis	7 jenis	87,50%	14 jenis	14 jenis	100%
5	1	01	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	174 kali		325 acara	200 acara	61,54%	174 kali	174 kali	100%
5	1	01	12	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah penyediaan pelayanan tamu dinas	50 tamu dinas		6.000 tamu dinas	6.000 tamu dinas	100,00%	50 tamu dinas	50 tamu dinas	100%
5	1	01	13	Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
5	1	01	14	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	500 kegiatan		300 kegiatan	286 kegiatan	95,33%	500 kegiatan	500 kegiatan	100%
5	1	01	15	Peringatan HUT Kota Malang	Jumlah kegiatan peringatan HUT Kota Malang			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	16	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	17	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Jumlah kegiatan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	01	18	Halal Bihalal dengan PNS, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah kegiatan halal bi halal yang diselenggarakan			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	19	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	20	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	21	Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan	Jumlah fasilitasi kegiatan Bulan Ramadhan			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	22	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Jumlah kegiatan hari Sumpah Pemuda			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	23	Peringatan Hari Pahlawan	Jumlah kegiatan Hari Pahlawan			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	24	Peringatan Hari Ibu	Jumlah kegiatan Hari Ibu			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	01	25	Penyediaan peralatan rumah tangga/bahan pembersih	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga/bahan pembersih selama 1 tahun anggaran	6 jenis		31 jenis	31 jenis	100,00%	6 jenis	6 jenis	100%
5	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
					Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	90%		100%	81,76%	81,76%	90%	90%	100%
5	1	02	01	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	10 unit		22 unit	22 unit	100,00%	10 unit	10 unit	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	02	02	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 jenis		45 unit	41 unit	91,11%	5 jenis	5 jenis	100%
5	1	02	03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 jenis		100 unit	88 unit	88,00%	9 jenis	9 jenis	100%
5	1	02	04	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan	5 jenis		11 unit	16 unit	145,45%	5 jenis	5 jenis	100%
5	1	02	05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	62 unit		62 unit	53 unit	85,48%	62 unit	62 unit	100%
5	1	02	06	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2 rumah jabatan		2 rumah jabatan	2 rumah jabatan	100,00%	2 rumah jabatan	2 rumah jabatan	100%
5	1	02	07	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 rumah dinas		1 rumah dinas	1 rumah dinas	100,00%	1 rumah dinas	1 rumah dinas	100%
5	1	02	08	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang layak jalan	3 unit		20 jenis	8 jenis	40,00%	3 unit	3 unit	100%
5	1	02	09	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	42 unit kendaraan		51 unit	63 unit	123,53%	42 unit kendaraan	42 unit kendaraan	100%
5	1	02	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21 jenis		5 jenis	4 jenis	80,00%	21 jenis	21 jenis	100%
5	1	02	11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 jenis		6 jenis	5 jenis	83,33%	3 jenis	3 jenis	100%
5	1	02	12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	17 jenis		19 jenis	19 jenis	100,00%	17 jenis	17 jenis	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	10 gedung		9 paket	9 paket	100,00%	10 gedung	10 gedung	100%
5	1	02	14	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	32 unit		30 unit	4 unit	13,33%	32 unit	32 unit	100%
5	1	02	15	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Command Center	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung command center			7 paket	7 paket	100,00%			
5	1	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara	15 gedung		15 paket	15 paket	100,00%	15 gedung	15 gedung	100%
5	1	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan komunikasi	2 jenis		5 jenis	5 jenis	100,00%	2 jenis	2 jenis	100%
5	1	02	18	Pemeliharaan taman perkantoran	Jumlah bulan pemeliharaan taman rekreasi Kota Malang	1 taman		12 bulan	12 bulan	100,00%	1 taman	1 taman	100%
5	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
					Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
5	1	05	01	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pembangunan			37 kali	35 kali	94,59%			
5	1	05	02	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Administrasi Umum	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Administrasi Umum			15 kali	20 kali	133,33%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	05	03	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan			18 kali	18 kali	100,00%			
5	1	05	04	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan			32 kali	32 kali	100,00%			
5	1	05	05	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum, Pemerintahan dan politik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang hukum dan politik			18 kali	24 kali	133,33%			
5	1	05	06	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	45 kali		36 kali	29 kali	80,56%	45 kali	45 kali	100%
5	1	05	07	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan SDM			12 kali	14 kali	116,67%			
5	1	05	08	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Fasilitasi Korps Musik Pemkot	159 kegiatan		115 kegiatan	115 kegiatan	100,00%	159 kegiatan	159 kegiatan	100%
5	1	05	09	Pengembangan jaringan persandian telekomunikasi	Jumlah pengadaan jaringan persandian telekomunikasi			4 paket	4 paket	100,00%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%		100% (9 dokumen)	100% (9 dokumen)	100,00%	100%	100%	100%
5	1	06	01	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	10 dokumen	10 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00%	10 dokumen	10 dokumen	100%
5	1	06	02	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya data inventaris aset Sekretariat Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
5	1	06	03	Peningkatan manajemen keuangan Sekretariat Daerah	Tersedianya manajamen pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
4	1	06	04	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran			2 dokumen	2 dokumen	100,00%			

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	-	-	76	77	78	78,5	77,11	79,71	79	80	-
2.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	60	60,94	62	65	-	67,71	70	71	-

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah lainnya

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang merupakan satu bagian manajemen Pemerintah Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang harus sinergis dengan rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan

secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kota Malang;

3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang;
4) Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
5) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sebagai tindak lanjut Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1) Kurangnya Jumlah SDM Aparatur;
2) Belum optimalnya data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan; dan
3) Belum optimalnya harmonisasi produk hukum daerah.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan bimtek;
2. Peningkatan harmonisasi Produk Hukum daerah; dan
3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*

   Karena Sekretariat Daerah bukan merupakan pelaksana urusan pemerintahan, capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)* tidak nampak dalam program-program Sekretariat Daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

   Dalam rangka meningkatkan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

   1) Peningkatan pelayanan administrasi surat;
   2) Sertifikasi ISO 9001 : 2015

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

   Terus melakukan upaya perbaikan pelayanan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur dalam rangka meningkatkan pelayanan di dilingkungan Sekretariat Daerah.

4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir Renja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RKPD dalam perjalanannya mengalami perubahan pagu anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan target kinerja yang diharapkan baik itu pengurangan pagu anggaran maupun penambahan pagu anggaran. Disamping itu proses ini menyesuaikan plafon anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Adapun review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2018 Kota Malang di lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

T-C.31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019

Kota Malang

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan		Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313	2.520.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan		Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313	2.520.000.000	
1.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	250.000.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	250.000.000	
1.2	Penyusunan LKPJ Walikota	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	300.000.000	Penyusunan LKPJ Walikota	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	300.000.000	
1.3	Monitoring dan Evalusi Penerapan SPM	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	2 dokumen	35.000.000	Monitoring dan Evalusi Penerapan SPM	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	2 dokumen	35.000.000	
1.4	Penegasan Batas Wilayah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pilar batas	1 dokumen	50.000.000	Penegasan Batas Wilayah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pilar batas wilayah	1 dokumen	50.000.000	
1.5	Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	2 dokumen	50.000.000	Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	2 dokumen	50.000.000	
1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan	115.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan	115.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen kerjasama daerah	10 MOU	50.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen kerjasama daerah	10 MOU	50.000.000	
1.8	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	Bagian Pemerintahan	Jumlah desk pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang difasilitasi	1 pemilu legislatif dan 1 pilpres dan wapres	250.000.000	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	Bagian Pemerintahan	Jumlah desk pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang difasilitasi	1 pemilu legislatif dan 1 pilpres dan wapres	250.000.000	
1.9	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	2 hari jadi daerah	10.000.000	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	2 hari jadi daerah	10.000.000	
1.10	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	5 administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi	50.000.000	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	5 difasilitasi administrasi	50.000.000	
1.11	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti dimonitoring dan evaluasi	5 kecamatan dan 57 kelurahan	25.000.000	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti dimonitoring dan evaluasi	5 kecamatan dan 57 kelurahan	25.000.000	
1.12	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	15.000.000	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	15.000.000	
1.13	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan dan 57 kelurahan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan dan 57 kelurahan	1.000.000.000	
1.14	Penguatan kelembagaan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	1 dokumen	25.000.000	Penguatan kelembagaan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	1 dokumen	25.000.000	
1.15	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	25.000.000	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	25.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	100.000.000	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	100.000.000	
1.17	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Bagian Pemerintahan	Peringkat hasil penilaian sinergitas Camat	Masuk 5 besar terbaik	35.000.000	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Bagian Pemerintahan	Peringkat hasil penilaian sinergitas Camat	5 besar terbaik	35.000.000	
1.18	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	45.000.000	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	45.000.000	
1.19	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	45.000.000	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	45.000.000	
1.20	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Walikota	1 dokumen	45.000.000	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Walikota	1 dokumen	45.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga		Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	7.975.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga		Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	8.475.000.000	
2.1	Penyediaan Layanan Kehumasan	Bagian Humas	Jumlah layanan kehumasan	6 jenis layanan	710.000.000	Layanan Kehumasan	Bagian Humas	Jumlah layanan kehumasan	6 jenis layanan	710.000.000	
2.2	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang	5.205.000.000	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang	5.175.000.000	
2.3	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis dokumentasi	500.000.000	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis dokumentasi	515.000.000	
2.4	Penerbitan majalah pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar	560.000.000	Penerbitan majalah pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar	560.000.000	
2.5	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Bagian Humas	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang	1.000.000.000	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Bagian Humas	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang	1.000.000.000	
2.6						Layanan Keprotokoleran	Bagian Humas	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan	515.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	18 fasilitasi	34.914.800.000	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Persentase kebijakan bidang kesejahteraaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	34.895.200.000	
3.1	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah modin perawat jenazah yang memperoleh pembinaan	100 orang	4.275.100.000	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah modin perawat jenazah yang memperoleh pembinaan	100 orang	4.275.100.000	
3.2	Sosialisasi bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial bidang kesejahteraan rakyat	100 pemohon	79.000.000	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah pemohon bantuan sosial bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan	50 pemohon	72.715.000	
3.3	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	2000 orang	100.000.000	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	2000 orang	100.000.000	
3.4	Fasilitasi Parade Muharam dan Hari Santri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam dan santri	400 orang	125.000.000	Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam	400 orang	82.150.000	
3.5						Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti hari santri	100 orang	59.400.000	
3.6	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	250 orang	7.575.000.000	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	250 orang	7.575.000.000	
3.7	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	2 draft rekomendasi	50.000.000	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	2 draft rekomendasi	50.000.000	
3.8	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	100 orang	115.000.000	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	100 orang	115.000.000	
3.9	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	1315 orang	592.590.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	1315 orang	592.590.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	250 orang	20.940.000.000	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	250 orang	20.940.000.000	
3.11	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pengembangan tilawatil Quran	100 orang	375.000.000	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pengembangan tilawatil Quran	100 orang	375.000.000	
3.12	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	100 orang	51.500.000	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	100 orang	50.547.500	
3.13	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta panjatan doa	350 orang	80.000.000	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta panjatan doa	350 orang	80.000.000	
3.14	Sosialisasi Wakaf	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	68.350.000	Sosialisasi Wakaf	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	68.350.000	
3.15	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	100 orang	60.000.000	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	100 orang	59.072.500	
3.16	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	100 orang	66.950.000	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	100 orang	66.950.000	
3.17	Fasilitasi Keiikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	80 orang	195.000.000	Fasilitasi Keiikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	80 orang	160.730.000	
3.18	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	41.310.000	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	41.310.000	
3.19	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta rapat koordinasi	5 kali	50.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta rapat koordinasi	20 orang	18.285.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen kebijakan	1 dokumen	75.000.000	Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta rapat kerja	400 orang	113.000.000	
4	Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian		Persentase ketersediaan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	100%	820.000.000	Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 Dokumen	820.000.000	
4.1	Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 dokumen	60.000.000	Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 dokumen	60.000.000	
4.2	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen perumusan bahan kebijakan pengembangan UMKM dan Koperasi	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen perumusan bahan kebijakan pengembangan UMKM dan Koperasi	1 dokumen	50.000.000	
4.3	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim pengendali inflasi daerah	10 kali pertemuan	150.000.000	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim pengendali inflasi daerah	10 kali pertemuan	150.000.000	
4.4	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	1 dokumen	50.000.000	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	1 dokumen	50.000.000	
4.5	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah badan usaha milik daerah yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	3 BUMD	100.000.000	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah badan usaha milik daerah yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	3 BUMD	100.000.000	
4.6	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 dokumen	75.000.000	
4.7	Penyusunan ranperda PDAM	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	Penyusunan draf ranperda PDAM	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	
4.8	Penyusunan ranperda BPR	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	Penyusunan draf ranperda BPR	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	Penyusunan ranperda RPH	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	Penyusunan draf ranperda RPH	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	75.000.000	
4.10	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim TPAKD	10 kali pertemuan	50.000.000	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim TPAKD	10 kali pertemuan	50.000.000	
4.11	Fasilitasi dan Koordinasi Perekonomian Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan dan koordinasi	2 kali pertemuan 2 kali koordinasi	60.000.000	Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan dan koordinasi	2 kali pertemuan 2 kali koordinasi	60.000.000	
5	Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur		Persentase kebijakan bidang SDA dan infrastruktur yang difasilitasi	100%	565.000.000	Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur		Persentase kebijakan bidang SDA dan infrastruktur yang difasilitasi	75%	565.000.000	
5.1	Fasilitasi Penyusunan kebijakan di Bidang SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang SDA yang difasilitasi	1 dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang SDA yang difasilitasi	1 dokumen rumusan kebijakan	150.000.000	
5.2	Fasilitasi Penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Perekonomian	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen	115.000.000	Fasilitasi Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan infrastruktur	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen rumusan kebijakan	115.000.000	
5.3	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1 dokumen	150.000.000	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1 dokumen	150.000.000	
5.4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen	150.000.000	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	2.419.400.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	2.423.345.000	
6.1	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelelangan	400 dokumen	1.359.400.000	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelelangan	350 dokumen	1.359.400.000	
6.2	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sistem pengadaan barang/jasa	1 sistem	650.000.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sistem pengadaan barang/jasa	1 sistem pengadaan barang/jasa	584.110.000	
6.3	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen	112.835.000	
6.4	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah FGD pra pengadaan barang/jasa	5 FGD	310.000.000	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah FGD pra pengadaan barang/jasa	2 FGD	367.000.000	
7	Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan		Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	1.350.000.000	Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan		Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	1.350.000.000	
7.1	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Bagian Hukum	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	250.000.000	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Bagian Hukum	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	250.000.000	
7.2	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Bagian Hukum	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	3 perda, 7 perwal	150.000.000	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Bagian Hukum	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	3 perda, 7 perwal	150.000.000	
7.3	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	Bagian Hukum	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 ranperda	530.000.000	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	Bagian Hukum	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 ranperda	530.000.000	
7.4	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	Bagian Hukum	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	10 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepsekda	250.000.000	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	Bagian Hukum	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	30 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepsekda	250.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bagian Hukum	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	170.000.000	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bagian Hukum	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	170.000.000	
8	Penerapan dan Penegakan Hukum		Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	2.205.000.000	Penerapan dan Penegakan Hukum		Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	2.205.000.000	
8.1	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	5000 buku	300.000.000	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	5000 buku	300.000.000	
8.2	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Bagian Hukum	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	300 orang	250.000.000	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Bagian Hukum	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	300 orang	250.000.000	
8.3	Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	300 orang	255.000.000	Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	300 orang	255.000.000	
8.4	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Bagian Hukum	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	500 orang	200.000.000	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Bagian Hukum	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	500 orang	200.000.000	
8.5	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	70 sidang	675.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 sidang	675.000.000	
8.6	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	200.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	200.000.000	
8.7	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Bagian Hukum	Jumlah peserta bimbingan Teknis	62 peserta	125.000.000	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Bagian Hukum	Jumlah peserta bimbingan Teknis	62 peserta	125.000.000	
8.8	Digitalisasi Produk Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	4 dokumen	20.000.000	Digitalisasi Produk Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	4 dokumen	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	1.350.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	1.350.000.000	
9.1	Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 dokumen	240.000.000	Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 dokumen	240.000.000	
9.2	Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	210.000.000	Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	210.000.000	
9.3	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah	1 dokumen	85.000.000	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah	1 dokumen	85.000.000	
9.4	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	5 ranperwal	125.000.000	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	5 ranperwal	125.000.000	
9.5	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	5 ranperwal	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	5 ranperwal	150.000.000	
9.6	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan yanblik	1 dokumen	250.000.000	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan yanblik	1 dokumen	250.000.000	
9.7	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	90.000.000	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	90.000.000	
9.8	Workshop Penyusunan SOP dan SP	Bagian Organisasi	Jumlah peserta workshop	200 orang	200.000.000	Workshop Penyusunan SOP dan SP	Bagian Organisasi	Jumlah peserta workshop	200 orang	200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	640.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	640.000.000	
10.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	1 dokumen	500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	1 dokumen	500.000.000	
10.2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	140.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	140.000.000	
11	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	2.300.000.000	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	2.300.000.000	
11.1	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan	1.500.000.000	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan	1.500.000.000	
11.2	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	800.000.000	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	800.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	100%	12.386.906.500	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%	12.091.506.500	
			Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%				Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%		
			Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%				Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		
			Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%				Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	100%		
12.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Humas	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.400 eksemplar	475.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Humas	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.400 eksemplar	475.000.000	
12.2	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Umum	Jumlah surat-surat kedinasan yang dilayani selama 1 tahun	14.500 surat	379.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Umum	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	14.500 surat	359.600.000	
12.3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	1.956.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	1.848.800.000	
12.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bagian Umum	Jumlah ruangan yang dibersihkan	32 ruangan	297.540.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bagian Umum	Jumlah ruangan yang dibersihkan	32 ruangan	297.540.000	
12.5	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bagian Umum	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	122.400.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bagian Umum	Jumlah peralatan rumah tangga	7 jenis	122.400.000	
12.6	Penyediaan bahan logistik kantor	Bagian Umum	Jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	285.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Bagian Umum	Jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	285.000.000	
12.7	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Bagian Umum	Jumlah tamu-tamu dinas yang difasilitasi	100 tamu dinas	539.100.000	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Bagian Umum	Jumlah tamu-tamu dinas	50 tamu dinas	628.100.000	
12.8	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Bagian Umum	Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil yang difasilitasi	500 kegiatan	2.371.660.000	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Bagian Umum	Jumlah kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	500 kegiatan	2.371.660.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.9	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/ Tertentu	Bagian Umum	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/ tertentu yang dilaksanakan	10 kegiatan	3.167.150.000	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/ Tertentu	Bagian Umum	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/ tertentu	10 kegiatan	3.410.550.000	
12.10	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Bagian Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan	1 kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	1 kegiatan	100.000.000	
12.11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah kendaraan laik jalan dari segi administrasi	100 STNK	214.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	192 STNK	214.000.000	
12.12	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket / 152.600 lembar / 250 buku	245.560.000	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket / 152.600 lembar / 250 buku	245.560.000	
12.13	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 paket	302.383.500	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 paket	302.383.500	
12.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	174 kali	1.430.913.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	174 kali	1.430.913.000	
12.15	Penyediaan layanan keprotokoleran	Bagian Humas	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan	500.000.000						
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik	100%	11.454.169.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik	100%	11.274.569.500	
			Persentase kendaraan dinas yang layak dipakai	100%				Persentase kendaraan dinas yang layak dipakai	100%		
13.1	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Bagian Umum	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 rumah jabatan	406.190.000	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Bagian Umum dan Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 rumah jabatan	504.500.000	
13.2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Bagian Umum	jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah dinas	236.930.000	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Bagian Umum	jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah dinas	241.131.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bagian Umum	jumlah paket pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	15 paket	1.846.550.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bagian Umum	jumlah gedung kantor yang dipelihara	14 paket	1.832.550.000	
13.4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	82.412.500	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	82.412.500	
13.5	Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	Bagian Umum	jumlah mebelair yang dipelihara	14 jenis	160.790.000	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Bagian Umum	jumlah mebeleur yang dipelihara	14 jenis	160.790.000	
13.6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Bagian Umum	jumlah paket pekerjaaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dilaksanakan	6 paket	714.361.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Bagian Umum	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	7 paket	538.000.000	
13.7	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan telekomunikasi	Bagian Umum	jumlah pemeliharaan jaringan telekomunikasi	6 jenis	178.619.000	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan telekomunikasi	Bagian Umum	jumlah jaringan telekomunikasi	4 jenis	173.397.000	
13.8	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Bagian Umum	Pemeliharaan taman rekereasi perkantoran	12 bulan	477.276.000	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Bagian Umum	Pemeliharaan taman perkantoran	12 bulan	445.848.000	
13.9						Penatausahaan barang milik daerah	Bagian Umum	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	45.000.000	
13.10	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	22 jenis	276.137.500	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	22 jenis	276.037.500	
13.11	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 jenis	357.400.000	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 jenis	357.400.000	
13.12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis	660.275.500	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis	660.275.500	
13.13	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	5 jenis	210.000.000	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	5 jenis	210.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan gedung kantor	62 unit, 3 paket	689.400.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan gedung kantor	62 unit, 3 paket	689.400.000	
13.15	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah mobil jabatan yang layak jalan	3 unit	100.000.000						
13.16	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	69 unit kendaraan	816.750.000						
13.17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.400 meter	2.695.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.400 meter	2.695.000.000	
13.18	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan mebelair rumah jabatan/ dinas	12 unit	160.000.000	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan mebelair rumah jabatan/ dinas	32 unit	160.000.000	
13.19	Pengadaan BBM dan Pelumas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan bbm dan pelumas	15.600 lembar kupon	1.386.078.000	Pengadaan BBM dan Pelumas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan bbm dan pelumas	15.600 lembar kupon	1.386.078.000	
13.20						Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah kendaraan dinas/operasional	69 unit	816.750.000	
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/bimtek	100%	3.132.787.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/bimtek	100%	3.152.787.000	
			Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%				Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%		
			Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%				Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%		
14.1	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan, Bagian Umum	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248 ASN, 1 kegiatan	255.802.000	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan, Bagian Umum	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248 ASN, 1 kegiatan	275.802.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Bagian Umum	jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang yang difasilitasi	159 kegiatan	976.985.000	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Bagian Umum	jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang yang difasilitasi	159 kegiatan	976.985.000	
14.3	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40 kali selama 12 bulan	200.000.000	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	60 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.4	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Perekonomian	32 kali selama 12 bulan	200.000.000	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	32 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.5	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi Umum	40 kali selama 12 bulan	200.000.000	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi Umum	40 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.6	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang ekonomi dan keuangan	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.7	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Staf Ahli Bidang Hukum dan politik	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang hukum dan politik	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang hukum dan politik	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.8	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang kemasyarakatan dan SDM	56 kali selama 12 bulan	200.000.000	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan SDM	56 kali selama 12 bulan	200.000.000	
14.9	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	45 kali selama 12 bulan	400.000.000	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	45 kali selama 12 bulan	400.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.10	Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	2 kegiatan/ 100 orang	300.000.000	Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	2 kegiatan/ 100 orang	300.000.000	
15	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	1.640.600.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	1.611.255.000	
15.1	Penyusunan Laporan Keuangan	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	705.600.000	Penyusunan Laporan Keuangan	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	721.255.000	
15.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	100.000.000	
15.3	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 dokumen	200.000.000	
15.4	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/ Pelayanan	Bagian Organisasi	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat	180.000.000	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/ Pelayanan	Bagian Organisasi	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat ISO 9001:2015	180.000.000	
15.5	Penyusunan/Reviu Renstra	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	175.000.000	Penyusunan/Reviu Renstra	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	175.000.000	
15.6	Penyusunan Renja/ RKT	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renja	1 dokumen	175.000.000	Penyusunan Renja/RKT	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renja	1 dokumen	175.000.000	
15.7	Penyusunan LAKIP SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan LAKIP SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	50.000.000	
15.8	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	4 dokumen	10.000.000	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	2 dokumen	10.000.000	
15.9	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Bagian Umum	Jumlah dokumen tentang aset Bagian Umum yang disusun	1 dokumen	45.000.000						

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan diusulkan oleh masing-masing Bagian Sekretariat Daerah kepada Bagian Organisasi sebagai bahan rancangan awal Renja Sekretariat. Selanjutnya Bagian Organisasi mengagendakan rapat pembahasan usulan program/kegiatan dimaksud untuk dilakukan sinkronisasi, baik disesuaikan dengan tugas pokok fungsi masing-masing Bagian maupun kesesuaian dengan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD. Dari pembahasan dimaksud diperoleh draft final Renja Sekretariat Daerah sebagai bahan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Sekretariat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah dengan mengundang pemangku kepentingan. Usulan terhadap program dan kegiatan di Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Malang

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan		Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313	
1.1	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti dimonitoring dan evaluasi	5 kecamatan dan 57 kelurahan	
1.2	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	
1.3	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	
1.4	Penyusunan LKPJ Walikota	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	
1.5	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan dan 57 kelurahan	
1.6	Penguatan kelembagaan kecamatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	1 dokumen	
1.7	Monitoring dan Evalusi Penerapan SPM	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	2 dokumen	

1	2	3	4	5	6
1.8	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan	
1.9	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen kerjasama daerah	10 MOU	
1.10	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	Bagian Pemerintahan	Jumlah desk pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang difasilitasi	1 pemilu legislatif dan 1 pilpres dan wapres	
1.11	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang	Bagian Pemerintahan	Jumlah administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	5 administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi	
13.12	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	
1.13	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	
1.14	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Bagian Pemerintahan	Peringkat hasil penilaian sinergitas Camat	Masuk 5 besar terbaik	
1.15	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	2 hari jadi daerah	
1.16	Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	2 dokumen	
1.17	Penegasan Batas Wilayah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen pilar batas	1 dokumen	
1.18	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	

1	2	3	4	5	6
1.19	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	
1.20	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Walikota	1 dokumen	
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga		Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	
2.1	Penyediaan Layanan Kehumasan	Bagian Humas	Jumlah layanan kehumasan	6 jenis layanan	
2.2	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang	
2.3	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis dokumentasi	
2.4	Penerbitan majalah pemerintah kota	Bagian Humas	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar	
2.5	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Bagian Humas	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang	

1	2	3	4	5	6
3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	18 fasilitasi	
3.1	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah modin perawat jenazah yang memperoleh pembinaan	100 orang	
3.2	Sosialisasi bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial bidang kesejahteraan rakyat	100 orang	
3.3	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	2000 orang	
3.4	Fasilitasi Parade Muharam dan Hari Santri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam dan santri	400 orang	
3.5	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	250 orang	
3.6	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	2 draft rekomendasi	
3.7	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	100 orang	
3.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	1315 orang	
3.9	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	250 orang	
3.10	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pengembangan tilawatil Quran	100 orang	

1	2	3	4	5	6
3.11	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	100 orang	
3.12	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta panjatan doa	350 orang	
3.13	Sosialisasi Wakaf	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	
3.14	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	100 orang	
3.15	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	100 orang	
3.16	Fasilitasi Keiikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	100 orang	
3.17	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	
3.18	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta rapat koordinasi	5 kali	
3.19	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen kebijakan	1 dokumen	

1	2	3	4	5	6
4	Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 dokumen	
4.1	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 dokumen	
4.2	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan UMKM dan Koperasi	1 dokumen	
4.3	Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim pengendali inflasi daerah	10 kali pertemuan	
4.4	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	1 dokumen	
4.5	Pembinaan badan usaha milik daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah badan usaha milik daerah yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	3 BUMD	
4.6	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 dokumen	
4.7	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan tim TPKAD	10 kali pertemuan	
4.8	Penyusunan ranperda PDAM	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	
4.9	Penyusunan ranperda BPR	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	
4.10	Penyusunan ranperda RPH	Bagian Pengembangan Perekonomian	jumlah ranperda	1 ranperda	
4.11	Fasilitasi dan Koordinasi Perekonomian Daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	Jumlah pertemuan dan koordinasi	12 bulan	

1	2	3	4	5	6
5	Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur		Persentase kebijakan bidang SDA dan infrastruktur yang difasilitasi	75%	
5.1	Fasilitasi Penyusunan kebijakan di Bidang SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang SDA yang difasilitasi	1 dokumen	
5.2	Fasilitasi Penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Perekonomian	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen	
5.3	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1 dokumen	
5.4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur	Bagian SDA dan PI	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	1 dokumen	
6	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	
6.1	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelelangan	400 dokumen	
6.2	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sistem pengadaan barang/jasa	1 sistem	
6.3	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen	
6.4	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah FGD pra pengadaan barang/jasa	5 FGD	

1	2	3	4	5	6
7	Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan		Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	
7.1	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Bagian Hukum	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	
7.2	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Bagian Hukum	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	3 perda, 7 perwal	
7.3	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	Bagian Hukum	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 ranperda	
7.4	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	Bagian Hukum	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	35 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepsekda	
7.5	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bagian Hukum	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	
8	Penerapan dan Penegakan Hukum		Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	
8.1	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	5000 buku	
8.2	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Bagian Hukum	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	300 orang	
8.3	Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	500 orang	
8.4	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Bagian Hukum	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	600 orang	
8.5	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 sidang	
8.6	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	

1	2	3	4	5	6
8.7	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Bagian Hukum	Jumlah peserta bimbingan Teknis	62 peserta	
8.8	Digitalisasi Produk Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	4 dokumen	
8.9	Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Bagian Hukum	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen	
9	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	
9.1	Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 dokumen	
9.2	Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	
9.3	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah	1 dokumen	
9.4	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	5 ranperwal	
9.5	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	5 ranperwal	
9.6	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan yanblik	1 dokumen	
9.7	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	
9.8	Workshop Penyusunan SOP dan SP	Bagian Organisasi	Jumlah peserta workshop	200 orang	

1	2	3	4	5	6
10	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	
10.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	1 dokumen	
10.2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	
11	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	
11.1	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan	
11.2	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	100%	
			Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%	
			Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%	
			Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	
12.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Umum	Jumlah surat-surat kedinasan yang dilayani selama 1 tahun	14.500 surat	
12.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	
12.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bagian Umum	Luasan ruangan yang dibersihkan	32 ruangan	

1	2	3	4	5	6
12.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah kendaraan dinas/operasional	192 STNK	
12.5	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket / 152.600 lembar / 250 buku	
12.6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 paket	
12.7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bagian Umum	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	7 jenis	
12.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Humas	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.400 eksemplar	
12.9	Penyediaan bahan logistik kantor	Bagian Umum	Jumlah bahan logistik kantor	9 jenis	
12.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	174 kali	
12.11	Penyediaan layanan keprotokoleran	Bagian Humas	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan	
12.12	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Bagian Umum	Jumlah tamu-tamu dinas yang difasilitasi	100 tamu dinas	
12.13	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Bagian Umum	Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil yang difasilitasi	500 kegiatan	
12.14	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Bagian Umum	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu yang dilaksanakan	10 kegiatan	
12.15	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan	1 kegiatan	

1	2	3	4	5	6
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	
			Persentase kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	
13.1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 jenis	
13.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis	
13.3	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	5 jenis	
13.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah peralatan gedung kantor	62 unit, 3 paket	
13.5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Bagian Umum	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 rumah jabatan	
13.6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bagian Umum	jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah dinas	
13.7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian Umum	jumlah paket pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	14 paket	
13.8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	

1	2	3	4	5	6
13.9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	42 unit kendaraan	
13.10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	22 jenis	
13.11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	
13.12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bagian Umum	jumlah mebeleur yang dipelihara	14 jenis	
13.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bagian Umum	jumlah paket pekerjaaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dilaksanakan	7 paket	
13.14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.400 meter	
13.15	Pengadaan meubleair rumah jabatan /dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah mebelair rumah jabatan/dinas	32 unit	
13.16	Pengadaan BBM dan Pelumas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah/volume bbm dan pelumas	15.600 lembar kupon	
13.17	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Bagian Umum	jumlah pemeliharaan jaringan telekomunikasi	6 jenis	
13.18	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Bagian Umum	Pemeliharaan taman rekereasi perkantoran	12 bulan	

1	2	3	4	5	6
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/bimtek	100%	
			Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%	
			Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%	
14.1	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Bagian Umum	jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang yang difasilitasi	159 kegiatan	
14.2	Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	2 kegiatan/100 orang	
14.3	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan, Bagian Umum	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248 ASN, 1 kegiatan	
14.4	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	60 kali selama 12 bulan	
14.5	Pengkoordinasian perumusan daerah bidang perekonomian	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	32 kali selama 12 bulan	
14.6	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi Umum	40 kali selama 12 bulan	
14.7	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	45 kali selama 12 bulan	

1	2	3	4	5	6
14.8	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaaan Fungsi staf Ahli bidang ekonomi keuangan	54 kali selama 12 bulan	
14.9	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Staff Ahli Bidang Hukum dan politik	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaaan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik	54 kali selama 12 bulan	
14.10	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Jumlah pelaksanaaan Fungsi Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM	56 kali selama 12 bulan	
15	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	
15.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	
15.2	Penyusunan Laporan Keuangan	Seluruh Bagian	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	
15.3	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 dokumen	
15.4	Penyusunan LAKIP SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	
15.5	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	Bagian Organisasi	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat	
15.6	Penyusunan/Reviu Renstra	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	
15.7	Penyusunan Renja/RKT	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen renja	1 dokumen	
15.8	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Bagian Pemerintahan	jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	4 dokumen	
15.9	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Bagian Umum	Jumlah dokumen tentang aset Bagian Umum yang disusun	1 dokumen	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Malang disamping untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah, juga dalam rangka melaksanakan pencapaian program nasional yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menunjang keberhasilan rencana kebijakan nasional.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebuah Perencanaan Strategik akan berhasil dengan baik jika terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan bawahan melalui proses interaksi yang baik yakni *top-down dan bottom-up approach.* Perencanaan Strategik juga merupakan prasyarat bagi pertanggungjawaban *(accountability),* dengan kata lain Akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan sebelum Perencanaan Strategik dibuat.

Perencanaan Strategik dibuat oleh setiap organisasi untuk menjawab beberapa alasan, yaitu:

1. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi, dimana tingkat kebutuhan masyarakat (pelanggan) semakin tinggi, sementara persediaan sumber daya yang terbatas. Dengan perencanaan strategik, organisasi diharapkan dapat mengantisipasi secara *proaktif* bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin;
3. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai organisasi di masa mendatang (berorientasi ke masa depan);
4. Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu Perencanaan Strategik harus adaptif dan fleksibel;

5. Untuk memberikan kepuasan pelanggan (masyarakat) dengan memberikan pelayanan prima *(service excellence),* karena pelanggan (masyarakat) merupakan faktor penentu untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
6. Keberhasilan organisasi

   Agar Perencanaan Strategik dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan perhatian, sebagai berikut:

   a. Harus disusun secara konsisten dalam situasi yang kompetitif dan transparansi, artinya di satu sisi harus dapat memperoleh hasil (manfaat) dari berbagai peluang yang ada serta di lain pihak harus juga mampu memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dan dapat mengancam kesinambungan organisasi;
   b. Harus memperhatikan kemampuan realistik organisasi untuk melaksanakan;
   c. Harus dioperasionalkan dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan penuh dari puncak pimpinan dan staf organisasi.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Malang selama lima tahun yang dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja adalah:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sedangkan Sasaran yang ditetapkan sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah	79

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019
1.	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	79
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) terdiri dari 15 (lima belas) program dan 141 (seratus empat puluh satu) kegiatan. Program dimaksud dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan;
b. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga dilaksanakan oleh Bagian Humas;
c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan;
d. Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
e. Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam;
f. Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
g. Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum;

h. Penerapan dan Penegakan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
i. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
j. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
k. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
l. Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh Bagian Umum serta Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Bagian Umum serta Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
n. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Pemerintahan serta Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
o. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Malang, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No.	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313	2.520.000.000	Bagian Pemerintahan
2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	8.475.000.000	Bagian Humas
3.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	34.895.200.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
4.	Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 dokumen	820.000.000	Bagian Pengembangan Perekonomian
5.	Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan infrastruktur yang difasilitasi	75%	565.000.000	Bagian SDA dan PI
6.	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	2.423.345.000	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
7.	Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	1.350.000.000	Bagian Hukum

No.	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
8.	Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	2.205.000.000	Bagian Hukum
9.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	1.350.000.000	Bagian Organisasi
10.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	640.000.000	Bagian Organisasi
11.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	2.300.000.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
12.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	100%	12.091.506.500	Bagian Humas
		Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%		Bagian Keuangan dan Perlengkapan
		Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%		Bagian Umum
		Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		Bagian Umum
13.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik	100%	11.274.569.500	Bagian Umum
		Persentase kendaraan dinas yang layak dipakai	100%		Bagian Keuangan dan Perlengkapan
14.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/ diklat/bimtek	100%	3.152.787.000	Bagian Pemerintahan
		Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%		Bagian Keuangan dan Perlengkapan
		Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%		Bagian Umum
15.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	1.611.255.000	Seluruh Bagian

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang

No.	Uraian	Permasalahan	Usulan/Solusi	Keterangan
1.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal	1. Terlaksananya monev refomasi birokrasi; 2. Penyempurnaan rencana aksi reformasi birokrasi.	Bagian Organisasi
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	1. Standar pelayanan belum melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya; 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik belum dilakukan terhadap seluruh standar pelayanan pada perangkat daerah; 3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target.	1. Terlaksananya penyusunan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat; 2. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan publik.	
3.	Belum optimalnya penyusunan uraian tugas jabatan	1. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan uraian jabatan; 2. Tidak menjadi prioritas perhatian oleh Perangkat Daerah; 3. Belum diterbitkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan.	1. Tersusunnya informasi jabatan; 2. Tersusunnya evaluasi jabatan; 3. Tersusunnya evaluasi kelembagaan.	
4.	Belum optimalnya penyusunan rumusan kebijakan bidang SDA dan PI	Penyusunan perumusan kebijakan belum optimal	1. Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan bidang SDA dan PI	Bagian SDA dan PI
5.	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang SDA dan PI	Pemantauan dan evaluasi bidang SDA dan PI belum optimal	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi bidang SDA dan PI 2. Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait	

No.	Uraian	Permasalahan	Usulan/Solusi	Keterangan
6.	Belum optimalnya pelaksanaan layanan administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	
7.	Pedoman Pengelolaan BUMD	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, namun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMD sehingga terjadi kekosongan aturan/belum adanya payung hukum	Segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMD	Bagian Pengembangan Perekonomian

2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Malang

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				57.543.545.000				63.241.399.500
4	01			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Penggordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi				57.543.545.000				63.241.399.500
4	01	15		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang		3,1313	2.520.000.000	Block Grant		3,1313	2.772.000.000
4	01	15	001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	Bagian Pemerintahan	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	250.000.000	Block Grant		1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	275.000.000
4	01	15	002	Penyusunan LKPJ Walikota	Jumlah dokumen LKPJ	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	300.000.000	Block Grant		1 dokumen	330.000.000
4	01	15	003	Monitoring dan Evalusi Penerapan SPM	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	Bagian Pemerintahan	2 dokumen	35.000.000	Block Grant		2 dokumen	38.500.000
4	01	15	004	Penegasan Batas Wilayah	Jumlah dokumen pilar batas wilayah	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	50.000.000	Block Grant		1 dokumen	55.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	15	005	Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	Bagian Pemerintahan	2 dokumen	50.000.000	Block Grant		2 dokumen	55.000.000
4	01	15	006	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan	2 kegiatan	115.000.000	Block Grant		2 kegiatan	126.500.000
4	01	15	007	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	Bagian Pemerintahan	10 MOU	50.000.000	Block Grant		10 MOU	55.000.000
4	01	15	008	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	Jumlah desk pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang difasilitasi	Bagian Pemerintahan	1 pemilu legislatif dan 1 pilpres dan wapres	250.000.000	Block Grant		1 pemilu legislatif dan 1 pilpres dan wapres	275.000.000
4	01	15	009	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	Bagian Pemerintahan	2 hari jadi daerah	10.000.000	Block Grant		2 hari jadi daerah	11.000.000
4	01	15	010	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang	Jumlah administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	Bagian Pemerintahan	5 difasilitasi administrasi	50.000.000	Block Grant		5 difasilitasi administrasi	55.000.000
4	01	15	011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti dimonitoring dan evaluasi	Bagian Pemerintahan	5 kecamatan dan 57 kelurahan	25.000.000	Block Grant		5 kecamatan dan 57 kelurahan	27.500.000
4	01	15	012	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	Bagian Pemerintahan	2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	15.000.000	Block Grant		2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	16.500.000
4	01	15	013	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	Bagian Pemerintahan	5 kecamatan dan 57 kelurahan	1.000.000.000	Block Grant		5 kecamatan dan 57 kelurahan	1.100.000.000
4	01	15	014	Penguatan kelembagaan kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	25.000.000	Block Grant		1 dokumen	27.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	15	015	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Bagian Pemerintahan	1 kegiatan	25.000.000	Block Grant		1 kegiatan	27.500.000
4	01	15	016	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Bagian Pemerintahan	Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	100.000.000	Block Grant		Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	110.000.000
4	01	15	017	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Peringkat hasil penilaian sinergitas Camat	Bagian Pemerintahan	5 besar terbaik	35.000.000	Block Grant		5 besar terbaik	38.500.000
4	01	15	018	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	45.000.000	Block Grant		1 dokumen	49.500.000
4	01	15	019	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	45.000.000	Block Grant		1 dokumen	49.500.000
4	01	15	020	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Walikota	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	45.000.000	Block Grant		1 dokumen	49.500.000
4	01	16		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan		100%	8.475.000.000	Block Grant		100%	9.322.500.000
4	01	16	001	Layanan Kehumasan	Jumlah layanan kehumasan	Bagian Humas	6 jenis layanan	710.000.000	Block Grant		6 jenis layanan	781.000.000
4	01	16	002	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	Bagian Humas	550 kali tayang	5.175.000.000	Block Grant		550 kali tayang	5.692.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	16	003	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah dokumentasi kebijakan	Bagian Humas	3 jenis dokumentasi	515.000.000	Block Grant		3 jenis dokumentasi	566.500.000
4	01	16	004	Penerbitan majalah pemerintah kota	Jumlah majalah yang diterbitkan	Bagian Humas	18.000 eksemplar	560.000.000	Block Grant		18.000 eksemplar	616.000.000
4	01	16	005	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah informasi yang disampaikan	Bagian Humas	694 kali tayang	1.000.000.000	Block Grant		694 kali tayang	1.100.000.000
4	01	16	006	Layanan Keprotokoleran	Jumlah layanan keprotokoleran	Bagian Humas	900 layanan	515.000.000	Block Grant		900 layanan	566.500.000
4	01	17		Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan bidang kesejahteraaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi		100%	34.895.200.000	Block Grant		100%	38.260.420.000
4	01	17	001	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Jumlah modin perawat jenazah yang memperoleh pembinaan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	4.275.100.000	Block Grant		100 orang	4.702.610.000
4	01	17	002	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah pemohon bantuan sosial bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	50 pemohon	72.715.000	Block Grant		100 orang	79.986.500
4	01	17	003	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	2000 orang	100.000.000	Block Grant		2000 orang	110.000.000
4	01	17	004	Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	400 orang	82.150.000	Block Grant		400 orang	90.365.000
4	01	17	005	Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	Jumlah peserta yang mengikuti hari santri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	59.400.000	Block Grant		250 orang	65.340.000
4	01	17	006	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	250 orang	7.575.000.000	Block Grant		2 draft rekomendasi	8.332.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	17	007	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	2 draft rekomendasi	50.000.000	Block Grant		100 orang	55.000.000
4	01	17	008	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	115.000.000	Block Grant		1315 orang	126.500.000
4	01	17	009	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	1315 orang	592.590.000	Block Grant		250 orang	651.849.000
4	01	17	010	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	250 orang	20.940.000.000	Block Grant		50 orang	23.034.000.000
4	01	17	011	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pengembangan tilawatil Quran	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	375.000.000	Block Grant		100 orang	412.500.000
4	01	17	012	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	50.547.500	Block Grant		350 orang	55.602.250
4	01	17	013	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Jumlah peserta panjatan doa	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	350 orang	80.000.000	Block Grant		100 orang	88.000.000
4	01	17	014	Sosialisasi Wakaf	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	68.350.000	Block Grant		100 orang	75.185.000
4	01	17	015	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	59.072.500	Block Grant		100 orang	64.979.750
4	01	17	016	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Jumlah peserta pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	66.950.000	Block Grant		50 orang	73.645.000
4	01	17	017	Fasilitasi Keiikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	80 orang	160.730.000	Block Grant		100 orang	176.803.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	17	018	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	100 orang	41.310.000	Block Grant		5 kali	45.441.000
4	01	17	019	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta rapat koordinasi	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	20 orang	18.285.000	Block Grant		1 dokumen	20.113.500
4	01	17	020	Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Jumlah peserta rapat kerja	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	400 orang	113.000.000	Block Grant		400 orang	124.300.000
4	01	18		Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian		8 dokumen	820.000.000	Block Grant		4 dokumen	902.000.000
4	01	18	001	Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 dokumen	60.000.000	Block Grant		1 dokumen	66.000.000
4	01	18	002	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Jumlah dokumen perumusan bahan kebijakan pengembangan UMKM dan Koperasi	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 dokumen	50.000.000	Block Grant		1 dokumen	55.000.000
4	01	18	003	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah pertemuan tim pengendali inflasi daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	10 kali pertemuan	150.000.000	Block Grant		10 kali pertemuan	165.000.000
4	01	18	004	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 dokumen	50.000.000	Block Grant		1 dokumen	55.000.000
4	01	18	005	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah badan usaha milik daerah yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	Bagian Pengembangan Perekonomian	3 BUMD	100.000.000	Block Grant		3 BUMD	110.000.000
4	01	18	006	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 dokumen	75.000.000	Block Grant		1 dokumen	82.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	18	008	Penyusunan draf ranperda PDAM	jumlah ranperda	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 ranperda	75.000.000	Block Grant		10 kali pertemuan	82.500.000
4	01	18	009	Penyusunan draf ranperda BPR	jumlah ranperda	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 ranperda	75.000.000	Block Grant		1 ranperda	82.500.000
4	01	18	010	Penyusunan draf ranperda RPH	jumlah ranperda	Bagian Pengembangan Perekonomian	1 ranperda	75.000.000	Block Grant		1 ranperda	82.500.000
4	01	18	011	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah pertemuan tim TPAKD	Bagian Pengembangan Perekonomian	10 kali pertemuan	50.000.000	Block Grant		1 ranperda	55.000.000
4	01	18	012	Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	Jumlah pertemuan dan koordinasi	Bagian Pengembangan Perekonomian	2 kali pertemuan 2 kali koordinasi	60.000.000	Block Grant		12 bulan	66.000.000
4	01	19		Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan infrastruktur yang difasilitasi		75%	565.000.000	Block Grant		100%	565.000.000
4	01	19	001	Fasilitasi Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang SDA yang difasilitasi	Bagian SDA dan Pengembangan Infrastrukstur	1 dokumen rumusan kebijakan	150.000.000	Block Grant		1 dokumen	150.000.000
4	01	19	002	Fasilitasi Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	Bagian SDA dan Pengembangan Infrastrukstur	1 dokumen rumusan kebijakan	115.000.000	Block Grant		1 dokumen	115.000.000
4	01	19	003	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	Bagian SDA dan Pengembangan Infrastrukstur	1 dokumen	150.000.000	Block Grant		1 dokumen	150.000.000
4	01	19	004	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur yang difasilitasi	Bagian SDA dan Pengembangan Infrastrukstur	1 dokumen	150.000.000	Block Grant		1 dokumen	150.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	20		Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan		100%	2.423.345.000	Block Grant		100%	2.665.679.500
4	01	20	001	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen hasil pelelangan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	350 dokumen	1.359.400.000	Block Grant		400 dokumen	1.495.340.000
4	01	20	002	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sistem pengadaan barang/jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 sistem pengadaan barang/jasa	584.110.000	Block Grant		1 sistem	642.521.000
4	01	20	003	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang dan jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen	112.835.000	Block Grant		1 dokumen	124.118.500
4	01	20	004	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah FGD pra pengadaan barang/jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 FGD	367.000.000	Block Grant		5 FGD	403.700.000
4	01	21		Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan		100%	1.350.000.000	Block Grant		100%	1.485.000.000
4	01	21	001	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	Bagian Hukum	70 orang	250.000.000	Block Grant		70 orang	275.000.000
4	01	21	002	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	Bagian Hukum	3 perda, 7 perwal	150.000.000	Block Grant		3 perda, 7 perwal	165.000.000
4	01	21	003	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	jumlah ranperda yang diharmonisasi	Bagian Hukum	10 ranperda	530.000.000	Block Grant		10 ranperda	583.000.000
4	01	21	004	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	Bagian Hukum	30 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepsekda	250.000.000	Block Grant		35 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepsekda	275.000.000
4	01	21	005	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	Bagian Hukum	1 dokumen	170.000.000	Block Grant		1 dokumen	187.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	22		Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah		100%	2.205.000.000	Block Grant		100%	2.425.500.000
4	01	22	001	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	Bagian Hukum	5000 buku	300.000.000	Block Grant		5000 buku	330.000.000
4	01	22	002	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	Bagian Hukum	300 orang	250.000.000	Block Grant		300 orang	275.000.000
4	01	22	003	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum	300 orang	255.000.000	Block Grant		500 orang	280.500.000
4	01	22	004	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	Bagian Hukum	500 orang	200.000.000	Block Grant		600 orang	220.000.000
4	01	22	005	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	Bagian Hukum	140 sidang	675.000.000	Block Grant		140 sidang	742.500.000
4	01	22	006	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	Bagian Hukum	11 sidang	200.000.000	Block Grant		11 sidang	220.000.000
4	01	22	007	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Jumlah peserta bimbingan Teknis	Bagian Hukum	62 peserta	125.000.000	Block Grant		62 peserta	137.500.000
4	01	22	008	Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	Bagian Hukum	4 dokumen	20.000.000	Block Grant		4 dokumen	22.000.000
4	01	22	009	Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	Bagian Hukum	2 dokumen	180.000.000	Block Grant		2 dokumen	198.000.000
4	01	23		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi		100%	1.350.000.000	Block Grant		100%	1.485.000.000
4	01	23	001	Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Bagian Organisasi	2 dokumen	240.000.000	Block Grant		2 dokumen	264.000.000
4	01	23	002	Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	1 dokumen	210.000.000	Block Grant		1 dokumen	231.000.000
4	01	23	003	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah	Bagian Organisasi	1 dokumen	85.000.000	Block Grant		1 dokumen	93.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	23	004	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	Bagian Organisasi	5 ranperwal	125.000.000	Block Grant		5 ranperwal	137.500.000
4	01	23	005	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	Bagian Organisasi	5 ranperwal	150.000.000	Block Grant		5 ranperwal	165.000.000
4	01	23	006	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan yanblik	Bagian Organisasi	1 dokumen	250.000.000	Block Grant		1 dokumen	275.000.000
4	01	23	007	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi	1 dokumen	90.000.000	Block Grant		1 dokumen	99.000.000
4	01	23	008	Workshop Penyusunan SOP dan SP	Jumlah peserta workshop	Bagian Organisasi	200 orang	200.000.000	Block Grant		200 orang	220.000.000
4	01	24		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti		100%	640.000.000	Block Grant		100%	704.000.000
4	01	24	002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	Bagian Organisasi	1 dokumen	500.000.000	Block Grant		1 dokumen	550.000.000
4	01	24	004	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	Bagian Organisasi	1 dokumen	140.000.000	Block Grant		1 dokumen	154.000.000
4	01	25		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan		100%	2.300.000.000	Block Grant		100%	2.530.000.000
4	01	25	001	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	1.500.000.000	Block Grant		12 bulan	1.650.000.000
4	01	25	002	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	800.000.000	Block Grant		12 bulan	880.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Urusan Umum				28.130.118.000				30.943.129.800
5	01			Umum				28.130.118.000				30.943.129.800
5	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran		100%	12.091.506.500	Block Grant		100%	13.300.657.150
					Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi		100%				100%	
					Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik		100%				100%	
					Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%				100%	
5	01	01	001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Humas	50.400 eksemplar	475.000.000	Block Grant		14.500 surat	522.500.000
5	01	01	002	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	Bagian Umum	14.500 surat	359.600.000	Block Grant		12 bulan	395.560.000
5	01	01	003	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik	Bagian Umum	12 bulan	1.848.800.000	Block Grant		32 ruangan	2.033.680.000
5	01	01	004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	Bagian Umum	32 ruangan	297.540.000	Block Grant		192 STNK	327.294.000
5	01	01	005	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Bagian Umum	7 jenis	122.400.000	Block Grant		1 paket / 152.600 lembar / 250 buku	134.640.000
5	01	01	006	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Bagian Umum	10 jenis	285.000.000	Block Grant		2 paket	313.500.000
5	01	01	007	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah tamu-tamu dinas	Bagian Umum	50 tamu dinas	628.100.000	Block Grant		7 jenis	690.910.000
5	01	01	008	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	Bagian Umum	500 kegiatan	2.371.660.000	Block Grant		50.400 eksemplar	2.608.826.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	009	Peringatan Hari-hari Besar/ Khusus/Tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Bagian Umum	10 kegiatan	3.410.550.000	Block Grant		9 jenis	3.751.605.000
5	01	01	010	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah fasilitasi kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Bagian Umum	1 kegiatan	100.000.000	Block Grant		174 kali	110.000.000
5	01	01	011	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	192 STNK	214.000.000	Block Grant		900 layanan	235.400.000
5	01	01	012	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	1 paket / 152.600 lembar / 250 buku	245.560.000	Block Grant		100 tamu dinas	270.116.000
5	01	01	013	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	2 paket	302.383.500	Block Grant		500 kegiatan	332.621.850
5	01	01	014	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	174 kali	1.430.913.000	Block Grant		10 kegiatan	1.574.004.300
5	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik		100%	11.274.569.500	Block Grant		100%	12.402.026.450
					Persentase kendaraan dinas yang layak dipakai		100%				100%	
5	01	02	001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Bagian Umum	2 rumah jabatan	504.500.000	Block Grant		2 rumah jabatan	554.950.000
5	01	02	002	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum	1 rumah dinas	241.131.000	Block Grant		1 rumah dinas	265.244.100
5	01	02	003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bagian Umum	14 paket	1.832.550.000	Block Grant		14 paket	2.015.805.000
5	01	02	004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bagian Umum	4 jenis	82.412.500	Block Grant		4 jenis	90.653.750

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	005	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang dipelihara	Bagian Umum	14 jenis	160.790.000	Block Grant		14 jenis	176.869.000
5	01	02	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Bagian Umum	7 paket	538.000.000	Block Grant		7 paket	591.800.000
5	01	02	007	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	jumlah jaringan telekomunikasi	Bagian Umum	4 jenis	173.397.000	Block Grant		4 jenis	190.736.700
5	01	02	008	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Pemeliharaan taman perkantoran	Bagian Umum	12 bulan	445.848.000	Block Grant		12 bulan	490.432.800
5	01	02	009	Penatausahaan barang milik daerah	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Bagian Umum	1 dokumen	45.000.000	Block Grant		1 dokumen	49.500.000
5	01	02	010	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum	22 jenis	276.037.500	Block Grant		22 jenis	303.641.250
5	01	02	011	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	5 jenis	357.400.000	Block Grant		5 jenis	393.140.000
5	01	02	012	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9 jenis	660.275.500	Block Grant		9 jenis	726.303.050
5	01	02	013	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	5 jenis	210.000.000	Block Grant		5 jenis	231.000.000
5	01	02	014	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	62 unit, 3 paket	689.400.000	Block Grant		62 unit, 3 paket	758.340.000
5	01	02	015	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	23.400 meter	2.695.000.000	Block Grant		23.400 meter	2.964.500.000
5	01	02	016	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	jumlah pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	32 unit	160.000.000	Block Grant		32 unit	176.000.000
5	01	02	017	Pengadaan BBM dan Pelumas	jumlah pengadaan bbm dan pelumas	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	15.600 lembar kupon	1.386.078.000	Block Grant		15.600 lembar kupon	1.524.685.800
5	01	02	018	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	69 unit	816.750.000	Block Grant		69 unit	898.425.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/bimtek		100%	3.152.787.000	Block Grant		100%	3.468.065.700
					Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan		100%				100%	
					Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi		100%				100%	
5	01	05	001	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan, Bagian Umum	248 ASN, 1 kegiatan	275.802.000	Block Grant		248 ASN, 1 kegiatan	303.382.200
5	01	05	002	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang yang difasilitasi	Bagian Umum	159 kegiatan	976.985.000	Block Grant		159 kegiatan	1.074.683.500
5	01	05	003	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	60 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		60 kali selama 12 bulan	220.000.000
5	01	05	004	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	32 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		32 kali selama 12 bulan	220.000.000
5	01	05	005	Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi Umum	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	40 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		40 kali selama 12 bulan	220.000.000
5	01	05	006	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		54 kali selama 12 bulan	220.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	05	007	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang hukum dan politik	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	54 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		54 kali selama 12 bulan	220.000.000
5	01	05	008	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Jumlah pelaksanaan fungsi Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan SDM	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	56 kali selama 12 bulan	200.000.000	Block Grant		56 kali selama 12 bulan	220.000.000
5	01	05	009	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	45 kali selama 12 bulan	400.000.000	Block Grant		45 kali selama 12 bulan	440.000.000
5	01	05	010	Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	2 kegiatan/100 orang	300.000.000	Block Grant		2 kegiatan/100 orang	330.000.000
5	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%	1.611.255.000	Block Grant		100%	1.772.380.500
5	01	06	001	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Sekretariat Daerah	10 dokumen	721.255.000	Block Grant		10 dokumen	793.380.500
5	01	06	002	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bagian Organisasi	1 dokumen	100.000.000	Block Grant		1 dokumen	110.000.000
5	01	06	003	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi	1 dokumen	200.000.000	Block Grant		1 dokumen	220.000.000
5	01	06	004	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015	Bagian Organisasi	1 sertifikat ISO 9001:2015	180.000.000	Block Grant		1 sertifikat ISO 9001:2015	198.000.000
5	01	06	005	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen renstra	Bagian Organisasi	1 dokumen	175.000.000	Block Grant		1 dokumen	192.500.000
5	01	06	006	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen renja	Bagian Organisasi	1 dokumen	175.000.000	Block Grant		1 dokumen	192.500.000
5	01	06	007	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	50.000.000	Block Grant		1 dokumen	55.000.000
5	01	06	008	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Bagian Pemerintahan	2 dokumen	10.000.000	Block Grant		2 dokumen	11.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Malang ini merupakan operasionalisasi visi, misi, dan strategi Sekretariat Daerah Kota Malang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2019, Sekretariat Daerah Kota Malang akan melaksanakan 15 (lima belas) program dan 141 (seratus empat puluh satu) kegiatan. Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, direncanakan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Malang sebesar Rp. 85.673.663.000 (delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).